

DAFTAR RUJUKAN

BUKU

Asas Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Posterior. Legislasi Indonesia, 308.

Amini, Nurilah. 2016. *Peraturan Kebijakan (Legislasi Semu) dan Penetapan*. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM.

Depdiknas. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta, Balai Pustaka.

Goesniadhei, Kusnu. 2020. *Harmonisasi Sistem Hukum: Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik*. Malang: Nasa Media Irfani.

Goesniadhie. 2016. *Harmonisasi Hukum dalam Perspektif Perundang-undangan (Lex Specialis suatu Masalah)*, Surabaya: JP Books.

Manullang, E. Fernando M. 2019. *Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum*. Jakarta: Kencana, edisi revisi.

Prasetyo, Teguh, Purnomosidi. 2020. *Membangun Hukum Berdasarkan Pancasila*. Bandung: Penerbit Nusa Media.

Sukiati. 2016. *Metodologi Penelitian Sebuah Pengantar*. Medan: CV. Manhaji.

Widiarto. 2017. *Penataan Ulang Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Indonesia*. Badan Pengkajian MPR RI.

JURNAL

Agustian (2016). "Teori Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Dan Judicial Review". Universitas Islam Indonesia (hlm. 102-103).

Anam. 2017, 28 Desember. "Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) Dalam Penelitian Hukum". Saiful Anam&Partners Advocates&Legal Consultants.

Azkiya, V. (2022). *“Angka Kecelakaan Lalu Lintas Di Indonesia Meningkat Di 2021, Tertinggi Dari Kecelakaan Motor”*. Katadata.Id.

Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. 2022. *“Banyaknya Kendaraan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali (Unit), 2020-2022”*. Bali:BPS.

Dewi (2020). *“Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Akuntabilitas Pelayanan Publik, Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Kantor Samsat Singaraja)”*. Undiksha Repository, (hlm. 2-3).

Dewi, Budiarta. 2020. *“Penegakan Hukum Terhadap Pengendara Motor Yang Tidak Menggunakan Helm Saat Berpakaian Adat Bali Di Wilayah Hukum Polres Tabanan”* Jurnal Preferensi Hukum, Volume 1, Nomor 1 (hlm. 170-171).

Dwi, M., Matompo, O.S., & Lestiawati, I. (2019). *Penerapan Sanksi Denda Terhadap Pengendara Motor Yang Tidak Menggunakan Helm (Studi Pada Kepolisian Resort Sigi)*. Jurnal Kolaboratif Sains, 1(1).

Febryanti, 2014. 30 Nov. *“Undang-Undang yang Mewajibkan Penggunaan Helm Standar”*, Hukum Online.

Hanansyah, 2021, 28 Oktober. *“Kendaraan Bermotor semakin Merajalela, Akankah Indonesia bisa Bebas?”*. ITS News

Hari Sanjaya Putra. 2020. *“Penegakkan Hukum Kewajiban Menggunakan Helm Bagi Pengendara Sepeda Motor Di Wilayah Hukum Polres Kabupaten Kepulauan Meranti Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan”*. Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.

Hartanto, 2017, 22 Agustus. *“Rata-rata Tiga Orang Meninggal Setiap Jam Akibat Kecelakaan Jalan”*. Kominfo.

Ibnu Sina Chandranegara, *“Bentuk-Bentuk Perampangan dan Harmonisasi Regulasi,”* Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 26 No.3, September, 2019.

Irfani. 2020. "Asas *Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum*" Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 16, Nomor 3 (hlm. 308).

Isabela. 2022, 30 Maret. "Hierarki Peraturan Perundang-undangan menurut UU No. 12 Tahun 2011". Kompas.

Kumala, 2023, Maret. "Jumlah Kendaraan di Indonesia 147 Juta Unit, 60 Persen di Pulau Jawa". Gaikindo

Kurniawan, 2023, 10 Februari, "Jumlah Kendaraan di Indonesia 147 Juta Unit, 87 Persen Motor". Kompas

Kusmagi, Marte Agung. 2015. *Keselamatan Berkendara di Jalan Raya*. Depok: Raih Asa Sukses.

Octora, Sumanjaya 2017. "Analisis Dampak Kebijakan Pembatasan Uang Muka Kredit (*Down Payment*) Terhadap Permintaan Mobil Di Kota Medan". Media Neliti, Volume 1 No. 11 (hlm. 1-2).

Pradnyana. 2015. *Efektifitas Pasal 106 Ayat 8 Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Pengendara Motor Pada Saat Menggunakan Pakaian Adat Bali(Studi Di Polres Gianyar)*. Journal UB, 10-15.

Pakarti. 2022, 14 Juli. "Kasus-Kasus Dispensasi di Indonesia". UIN Sunan Gunung Djati.

Prayogo. 2016. "Penerapan Asas Kepastian Hukum" Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 13, Nomor 2 (hlm.194).

Rayana, I. K. P., Sukadana, I. K., & Sutama, I. N. (2019). *Efektivitas Penggunaan Helm Saat Berkendara di Wilayah Hukum Polres Bangli*. Jurnal Analogi Hukum.

Santi. 2017. "Menyoal Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia". Tersedia pada <https://jurnal.jentera.ac.id/index.php/jentera/article/download/10/9> (diakses tanggal 12 Januari 2024).

Satria. 2022, 12 Juni. "Polisi Jangan Hanya Fokus dengan Tilang tapi Juga Teguran". Kompas.

Silitonga, 2022. 9 Juni. *"Asas Lex Superior Derogate Legi Inferiori dan Kedudukan Surat Edaran dalam Perundang-Undangan"*, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Suadnyana, I. W. (2019). *Majelis Desa Adat Minta Solusi untuk Udeng Pemangku*. Denpasar: Tribun Bali.

Suadnyana, I. W. (2023). *Polisi Catat 3.297 Laka Lantas di Bali Selama 6 Bulan, 285 Orang Tewas*. Denpasar: detikBali.

Susanti. 2017, Juli. *"Menyoal Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia"*. Jurnal Jentera, Volume 1, Nomor 2 (hlm. 130-131).

Wahyuni, 2023, 24 Mei. *"Mengenal Pseudo Law atau Legislasi Semu"*. Hukum Online.

Windia, W. P. (2015). *Hukum Adat Bali Aneka Kasus dan Penyelesaiannya*. Gianyar: Dinas Kebudayaan Kabupaten Gianyar Bali.

Zulfahmi. 2023. *"Keadilan dan Kepastian Hukum"*. Jurnal UMJ, Volume 06, Nomor 2 (hlm.255-257).

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Peraturan Menteri Perindustrian No. 40/M-IND/PER/6/2008
Tahun 2008 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI)
Helm Pengendara Bermotor Roda Dua Secara Wajib

Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 217
Tahun 1986

SKRIPSI

Anggraini, R. 2014. *Kesadaran Hukum Pengguna Kendaraan Bermotor Roda Dua Dalam Berlalu Lintas*. Doctoral dissertation, Universitas Mataram.

Antari. 2019. *Tinjauan Yuridis Mengenai Antynomy Normen (Konflik Norma) Antara Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria Dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Terkait Jangka Waktu Perolehan Hak Atas Tanah*. Skripsi. Universitas Pendidikan Ganesha.

Dahlia. 2022. *Makna Busana Adat Masyarakat Hindu Bali Dalam Peribadatan (Studi Kasus Pekon Kiluan Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus)*. Skripsi. Universitas Islam Negeri.

Wintari. 2021. *Eksistensi Keputusan Gubernur Nomor 217 Tahun 1986 Terkait Dengan Penggunaan Pakaian Adat Bali Dalam Berlalu Lintas Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*. Skripsi. UNMAS Denpasar.

Putra. 2022. *Hubungan Antara Kontrol Diri dan Kesadaran Diri Dengan Kepatuhan Lalu Lintas Pada Mahasiswa Pengendara Sepeda Motor*. Skripsi. Universitas Islam Negeri.

Putri. 2017. *Pengaruh Harga Beli, Pendapatan Konsumen Terhadap Pilihan Konsumen Membeli Sepeda Motor*. Tugas Akhir. Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi Bisnis, Universitas Brawijaya Malang.

Sayuna. 2016. *Harmonisasi dan Sinkronisasi Hukum Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Ditinjau Dari Otentisitas Akta Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Tesis, Surakarta: Universitas Sebelas Maret.

Tarmizi, Fadhl. 2019. *Penegakan Hukum Terhadap Pengendara Sepeda Motor Yang Tidak Menggunakan Helm Dihubungkan Dengan Pasal 291 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan : Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung*. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

